

Drs. Taslim HM Yasin, M.Si, dkk

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

**Aktualisasi Ragam Varian
Umat Beragama di Indonesia**

Editor:

FIRDAUS M. YUNUS, M.Hum, M.Si
Drs. H. SOUFYAN IBRAHIM, M.Ag



DRS. H. TASLIM HM YASIN, M.Si, dkk

KERUKUNAN UMAT BERAGAM

Ragam Varian Umat Beragama di Indonesia

Editor

FIRDAUS M. YUNUS, M.Hum, M.Si
Drs. H. SOUFYAN IBRAHIM, M.Ag

Diterbitkan Oleh:
Ushuluddin Publishing
2013

**PERPUSTAKAAN NASIONAL
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)**

**KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Ragam Varian Umat Beragama di Indonesia**

Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Tahun 2013
Ushuluddin Publishing
xxvi + 186 hlm, 13 cm x 20,5 cm
ISBN: 978-602-1216-02-6

Hak Cipta Pada Penulis
All Right Reserved
Cetakan Pertama, September 2013

Pengarang : Drs. H. Taslim HM Yasin, M.Si, dkk
Editor ; Firdaus M. Yunus, M.Hum, M.Si
Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag.
Layout : Jundy Grafika

Ushuluddin Publishing
Jl. Lingkar Kampus Darussalam, Banda Aceh 23111
Telp (0651) 7551295 /Fax. (0651) 7551295
Email:

PENGANTAR DEKAN



Segala puji bagi Allah Yang mengajarkan manusia dengan *qalam*. Goresan *qalam* (pena) menjadi simbol peradaban dan pencerahan sepanjang sejarah kehidupan. Fungsi *qalam* tetap dijunjung tinggi karena jejak peradaban masa lalu hanya mampu dilestarikan dan diabadikan dengannya.

Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. yang diutus untuk mengajarkan manusia. Kemuliaan pengajaran ini disebutkan dalam sebuah hadits: *"Kalian yang paling baik adalah orang mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an"*

Dalam rangka Ulang Tahun Emas Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, kami berinisiasikan untuk melakukan kegiatan ilmiah dalam bentuk penulisan guna *upgrading* kapasitas keilmuan bagi akademisi. Buku-buku dari pada dosen dengan *background* keilmuan beragam baik terkait dengan Al-Quran-Hadits, Perbandingan Agama dan Aqidah - Filsafat.

Terkait dengan aktivitas ilmiah di atas, Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penulis yang telah menyelesaikan tulisannya yang berjudul *"Kerukunan Umat Beragama (Aktualisasi Ragam Varian Umat Beragama di Indonesia)"*.

Urgensitas ini untuk dikaji mengingat problematika masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk memiliki kebudayaan yang multikultural, karena masing-masing etnik memiliki karakter budaya yang unik sebagai satu kesatuan kebudayaan Indonesia. Unsur formal kebudayaan terletak dalam karya budi masyarakat yang mentransformasikan data, fakta dan situasi yang

dihadapinya menjadi nilai bagi manusia. Martabat kebudayaan ditentukan oleh nilai-nilai, tanpa nilai kemungkinan akan melahirkan implikasi negatif dari sebuah kebudayaan.

Kebudayaan pada umumnya tidak dapat di lihat secara parsial. Sebab kebudayaan itu sendiri sebuah keutuhan sistemik, mulai dari nilai budaya, pandangan hidup, norma, moral adat istiadat, hukum, perilaku dan lain sebagainya. Setiap manusia, baik secara individu dan sosial memiliki kondisi dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga norma, etika serta ekspresi kebudayaannya berbeda pula. Konsekuensi kemajemukan budaya pada dasarnya merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia. Menurut Gramsci kemajemukan membutuhkan pengorganisasian kelompok-kelompok sosial agar bisa merumuskan jati dirinya dengan jalan mengatasi perpecahan masyarakat menjadi individu-individu, bila hal itu terjadi dikhawatirkan relasi sosial tidak mempunyai kekuatan sosial.

Indonesia dengan keragaman budayanya harus dikembangkan dengan kesadaran etis. Karena dominasi sebuah etnik tertentu atas etnik lainnya yang mengandaikan adanya sebuah struktur hirarkhis yang menempatkan etnik dominan pada posisi lebih tinggi dan menempatkan yang lain pada posisi lebih rendah harus digugat, karena apabila dibiarkan akan merusak sendi kehidupan masyarakat yang plural, dan pada akhirnya nanti akan mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Masyarakat plural adalah masyarakat yang terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok ras, agama atau bahasa yang berbeda-beda. Untuk itu dibutuhkan suatu struktur sosial sebagai model dalam membedakan serta mengkonseptualisasikan berbagai bagian dari suatu sistem sosial dan hubungan antar bagian-bagian.

Kami dari unsur pimpinan merasa bahwa kehadiran buku ini memberikan nuansa baru di bidang keilmuan yang

sedang berkembang dewasa ini. Akhirnya, atas nama civitas akademika Fak. Ushuluddin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga buku-buku yang diterbitkan Fakultas Ushuluddin memberikan kontribusi positif kepada pembaca.

Banda Aceh, September 2013
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. H. Syamsul Rijal Sys, M.Ag

DAFTAR ISI

PENGANTAR DEKAN - iii

PENGANTAR EDITOR- vii

PRAWACANA- xiii

DAFTAR ISI- xxi

DIALOG UMAT BERAGAMA; MEMBUKA SEKAT-SEKAT EKSKLUSIVISME (Taslim HM. Yasin)

Pendahuluan- 1

Pola Dialog Antar Umat Beragama- 3

Pentingnya Studi Ilmu Perbandingan Agama - 5

Sikap Dialog Antar Umat Beragama- 11

Dialog dan Kerjasama- 16

Masa Depan Agama-agama - 18

Wacana Inklusivisme- 22

Daftar Pustaka- 24

PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH (Firdaus M. Yunus)

Pendahuluan- 27

Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Aceh- 33

Peran Dialog Sebagai Prasyarat Kerukunan Antar
Umat Agama- 37

Peran Organisasi Masyarakat dalam Mewujudkan
Kerukunan Umat Beragama- 42

Penutup- 47

Daftar Pustaka- 49

KERUKUNAN BERAGAMA DI ACEH; SEBUAH ANALISA AWAL (Muhammad Sahlan Hanafiah)

Pendahuluan - 51

Beberapa Faktor Perekat Kerukunan- 52

Langkah Memperkuat Kerukunan- 57
Tantangan Dalam Membangun Kerukunan- 62
Daftar Pustaka- 64

**PARADIGMA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN SOLUSI PEMECAHANNYA (HM. Husein A. Wahab)**

Pendahuluan- 67
Dasar Pertimbangan- 68
Permasalahan Yang Dihadapi- 71
Pendekatan Pemecahan- 78
Penutup- 84
Daftar Pustaka- 85

**TINDAK KEKERASAN DIANTARA UMAT BERAGAMA
(Safrilsyah)**

Pendahuluan- 87
Kekerasan dalam ilmu Psikologi- 91
Menurunkan Perilaku Agresif- 96
Penutup- 98
Daftar Pustaka, 99

**URGENSITAS PENYULUHAN UNTUK PEMAHAMAN
AGAMA (Fauzi Saleh)**

Pendahuluan- 103
Kearifan Metodologis Dalam Penyuluhan- 104
Kualifikasi Penyuluh- 108
Memposisikan Potensi Masyarakat - 110
Manajemen Penyuluhan - 112
Penutup- 119
Daftar Pustaka- 119

**KERUKUNAN UMAT BERAGAMA;
STUDI DI PEUNAYONG, KUTA ALAM BANDA ACEH (Abd
Majid)**

Pendahuluan- 121
Membangun Dialog- 123

Kerukunan Membina Sikap Sosial dan Keda - 127
Pluralitas Kehidupan Umat Beragama - 129
Hambatan dan Tantangannya di Era Global - 131
Beberapa Pandangan Terhadap Kerukunan Umat Beragama - 134
Faktor-Faktor Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama - 142
Perilaku Masyarakat terhadap Toleransi Umat Beragama - 147
Hubungan Kerukunan Antar Umat Beragama - 152
Penutup - 158
Daftar Pustaka - 160

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Burhanuddin Banta Cut)

Pendahuluan, - 165
Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia - 168
Macam-Macam Kerukunan Umat Beragama di Indonesia - 169
Eksklusif atau Pluralis - 169
Perspektif Baru - 171
Teologi Agama-Agama - 172
Kendala-Kendala Dalam Kerukunan Antar Umat Beragama - 173
Cara-cara Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia - 175
Pandangan Islam Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama - 176
Mencari Model Kerukunan Antarumat Beragama, 183
Penutup - 184
Daftar Pustaka - 185

TINDAK KEKERASAN DI ANTARA UMAT BERAGAMA

Oleh: **Safrihsyah**

(Dosen Prodi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin
IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara multi agama, etnis dan budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai segi kemajemukan sosial-budaya akan tetap menjadi dinamika sosial yang harus selalu diperhitungkan dalam mewujudkan keutuhan dan persatuan nasional. Kemajemukan, pluralitas bangsa adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi keunikan yang harus dijaga dengan saling toleransi dalam kehidupan beragama yang dinamis. Hal tersebut diperlukan karena ia merupakan faktor dasar yang bersifat menentukan bagi terwujudnya stabilitas nasional, persatuan dan kerukunan, perdamaian dan ketenangan hidup.¹ Kehidupan beragama yang dinamis dengan terciptanya kerukunan umat beragama tentu saja membawa manfaat yang sangat besar. Umat beragama dapat mewujudkan kerukunan umat beragama dalam kesehariannya, minimal terjaminnya serta dihormatinya iman dan identitas mereka oleh pihak lain, dan maksimal adalah terbukanya peluang untuk membuktikan keagungan agama mereka masing-masing dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

¹Suryosumarto Budisantoso, H, "Ketahanan Nasional Indonesia, Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara" (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2001), 32.

²Moerdiono, *Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran* (Jakarta: Sarasehan Sehari Majelis Ulama Indonesia, 5 Nopember 1966), 2.

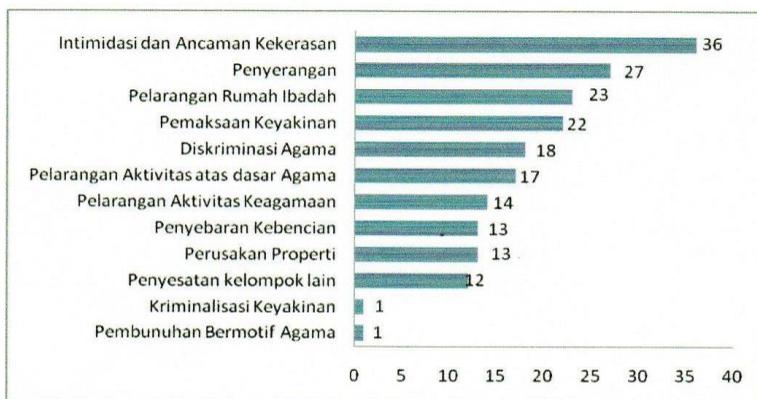
Peristiwa kerusuhan diantara umat beragama yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah kerusuhan agama, tetapi umat beragama dijadikan alat untuk mempercepat meletusnya kerusuhan. Menurut statistik politik, yang paling cepat menimbulkan kerusuhan adalah alasan agama dan alasan sosial ekonomi. Sebagai bukti misalnya banyak daerah saat ini dilanda konflik yang di isukan oleh orang atau kelompok tertentu sehingga menjadi isu besar dan berdampak luas, termasuk kepada sentimen agama walaupun pemerintah telah memberitahukan dengan tegas bahwa kejadian-kejadian yang terjadi bukanlah isu agama semata tetapi disebabkan beberapa faktor lain seperti dendam, sakit hati, iri hati, kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, perebutan kekasih atau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang senang dengan kekacauan untuk mencari keuntungan kelompok ataupun pribadi. Semua kejadian tersebut terkadang hanya dari hal-hal yang kecil-individual, namun kemudian melebar-besar menjadi isu agama dan kepercayaan suatu umat. Potensi konflik atas nama agama menjadi potensi yang memunculkan kekerasan dalam masyarakat.³

Kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat menentukan bagi terwujudnya stabilitas nasional, persatuan dan kerukunan, perdamaian dan ketenangan hidup, kehidupan beragama yang dinamis dengan terciptanya kerukunan umat beragama tentu saja membawa manfaat yang sangat besar. Salah satu manfaatnya yaitu terwujudnya kerukunan umat beragama serta dihormatinya iman dan identitas masing-masing pemeluk agama oleh pemeluk lain, dan maksimal adalah terbukanya peluang untuk membuktikan keagungan agama

³Ridho, 2013, <http://ridhofkip.blogspot.com/2013/03/kerukunan-umat-beragama-menuju.html>, hal.7.

masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Catatan panjang kerusuhan dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Toleransi tahun 2012 yang dirilis *The Wahid Institute* semenjak tahun 2008 menunjukkan bahwa tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan adalah peringkat tertinggi yang terjadi di masyarakat (36 kasus) dan pelarangan rumah ibadah (23 kasus), selegkapnya dapat di lihat pada tabel.1. dibawah ini.⁵



Grafik 7 Bentuk intoleransi dan diskriminasi agama tahun 2012

Berdasarkan data Setara Institut bahwa terjadi peningkatan tindak kekerasan atas nama agama. Pada akhir 2011, kelompok minoritas Islam Syiah yang mendirikan

⁴Moerdiono, *Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta, Sarasehan Sehari Majelis Ulama Indonesia, 5 Nopember 1966, hal. 5

⁵Laporan The Wahid Institute tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia, 2012. http://wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=213/hl=id/Laporan_KBB_Dan_Intoleransi_2012. hal.1

pesantren di sebuah desa di Sampang, Madura, diserang dan diusir oleh orang-orang yang tidak dikenal. Selanjutnya, massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan penyerangan terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 20 April 2012. Berulangnya kasus-kasus penutupan dan pengrusakan tempat ibadah, hingga pengusiran kelompok minoritas, merupakan fakta yang mengindikasikan pemerintah tidak bisa bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok pelaku kekerasan.⁶

Walaupun pemerintah dan tokoh agama telah mensosialisasikan dampak negatif dari konflik antar umat beragama, namun tindak kekerasan (intimidasi, pembunuhan, diskriminasi) masih saja kerap terjadi. Bahkan semakin meningkatnya berbagai tindak kekerasan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kelompok, di Aceh merupakan realitas pahit yang dihadapi oleh bangsa Aceh saat ini. Berbagai tindak kekerasan seperti yang terjadi di kerasan terhadap pengikut teungku Aiyub (Bireun), penurunan dan tindak kekerasan terhadap khatib (Pidie), penutupan tempat ibadah (Subulussalam) dan di berbagai wilayah Aceh yang sering dipaparkan melalui berbagai media massa telah menimbulkan keprihatinan pada sebagian besar anggota masyarakat.⁷

Tulisan singkat ini juga mencoba berbagi solusi alternatif terhadap permasalahan perilaku kekerasan yang dalam istilah psikologi dikenal dengan "*Prilaku Agresif*". Diantara hal penting yang akan dibahas adalah "mengapa masyarakat sangat mudah melakukan tindakan kekerasan (atas nama agama dan kepercayaan) seperti yang mudah di jumpai akhir-akhir ini? Apa yang menyebabkannya? Apa

⁶Laporan SETARA INSTITUTE tentang Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, 2012. dalam, <http://www.setara-institute.org/en/content/report-freedom-religion-and-belief-mid-2013>

⁷ Serambi Indonesia, 26 Mei 2013.

yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa yang akan datang?". Dengan kata lain tulisan ini, akan menjelaskan berbagai tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi pada masyarakat, dengan menggunakan "pisau" psikologi.

Kekerasan dalam ilmu Psikologi

Dalam psikologi, istilah yang lazim digunakan untuk tindak kekerasan di tingkat individu adalah "*perilaku agresif*". Perilaku agresif adalah perilaku yang ditujukan untuk menyakiti makhluk hidup lain baik secara fisik maupun secara mental. Perusakan benda-benda baru dianggap merupakan perilaku agresif bila tujuan akhirnya adalah untuk menyakiti orang lain.⁸ Dan dalam tulisan ini tidak dibedakan penggunaan istilah tindak kekerasan dan perilaku agresif karena menunjuk pada pengertian yang sama. Terdapat beberapa teori psikologi yang membahas terbentuknya tindak kekerasan/ perilaku agresif, diantaranya adalah:

Teori Belajar instrumental dan belajar observational' dalam pembentukan perilaku agresif. Belajar instrumental merupakan salah satu mekanisme belajar utama dalam membentuk perilaku manusia. Belajar instrumental pada dasarnya mengatakan bahwa suatu perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif (*reward*) akan diulangi sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif (*punishment*) tidak akan diulangi.⁹ Konsekuensi positif ini dalamnya bermacam-macam bentuk seperti, penghormatan, status sosial yang tinggi, kekuasaan, bahkan kadang kala diperoleh dari penderitaan orang lain yang menjadi korban perilaku agresif tersebut. Beberapa contoh di bawah ini akan

⁸Robert Baron, "*Psikologi Sosial*", Edisi Kesepuluh (Jakarta: Erlangga), 2003), 38.

⁹Sarlito Wiraman Sarwono, "*Psikologi Sosial*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 99.

memperjelas terbentuknya perilaku agresif melalui proses belajar instrumental ini. Pelaku tindak kekerasan atas nama agama seperti, merusak rumah ibadah, mengintimasi, membunuh penganut agama yang berbeda, dan akan dihormati kelompoknya karena paling berani menyerang kelompok lain. Hal tersebut mendapat konsekuensi positif berupa penghormatan dari kelompok dan lingkungannya. Dalam hal ini terdapat kaitan antara perilaku agresif dengan konsekuensi positif yang menyertainya harus terjadi secara konsisten untuk suatu jangka waktu tertentu sebelum pola perilaku tersebut terbentuk secara relatif menetap. Misalnya, individu atau kelompok yang punya kekuatan pada contoh di atas mungkin tidak akan melanjutkan perilaku intimidasi dan pengrusakan terhadap kelompok agama lain kalau ada kelompok agama yang berani melaporkan perbuatannya kepada penegak hukum sehingga perilaku tersebut tidak selalu menghasilkan "penghormatan" bahkan dapat menghasilkan "hukuman".¹⁰

Belajar observasional atau kadang disebut juga belajar sosial (*Social Learning*) mengatakan bahwa seseorang akan mempelajari suatu perilaku atau memperkuat perilaku yang sudah dimilikinya hanya dengan mengamati orang lain (model) melaksanakan perilaku tersebut.¹¹ Dalam hal ini pembentukan perilaku agresif dapat terjadi bila : (a) perihal agresif si model mendapatkan konsekuensi positif; (b) perilaku agresif si model yang seharusnya dihukum tidak dihukum; (c) perilaku agresif tersebut mendapat pembenaran secara sosial. Sebaliknya bila perilaku agresif model mendapat hukuman, maka individu tidak akan meniru perilaku agresif tersebut. Contoh berikut ini dapat memperjelas proses pembentukan perilaku agresif tersebut. Pemberitaan di media massa tentang perusakan dan penganiayaan oleh FPI (Front Pembela Islam) terhadap satu

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

kafe, tempat hiburan yang buka pada bulan puasa, Atau sebaliknya penganiayaan dan pembunuhan terhadap tertuduh dukun santet atau pengikut aliran sesat oleh sekelompok masyarakat (amuk massa). Pelaku tindak kekerasan (kelompok FPI atau masyarakat yang beringas) dengan bebas melakukan perilaku agresif tersebut tanpa konsekuensi apa-apa, bahkan membawa pulang jarahan dari tempat hiburan atau rumah penduduk yang dirusak, bahkan mereka mendapat pujian dari masyarakat lain. Hal ini akan menyebabkan mereka yang membaca cenderung untuk melakukan hal yang sama bila ada kesempatan.

Dari uraian dan contoh-contoh di atas kiranya dapat menjelaskan terjadinya peningkatan tindak kekerasan di masyarakat karena berbagai perilaku agresif yang seharusnya mendapat hukuman (*konsekuensi negatif*) seringkali dibiarkan saja oleh yang berwajib. Bahkan tidak jarang pelaku perilaku agresif tersebut justru mendapatkan penghargaan, pujian, atau konsekuensi positif lain.

Merujuk kepada teori mekanisme pengaturan-diri dari Bandura (1986), maka dapat dijelaskan bagaimana perilaku agresif juga dapat dilakukan oleh individu dan kelompok atas nama agama. Mekanisme pengaturan-diri yang dimaksud di sini adalah kemampuan individu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kontrol internal dirinya untuk mendapatkan suatu konsekuensi positif.¹² Dalam hal ini diasumsikan bahwa individu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkannya. Hal ini paling sering dijumpai pada perilaku yang menguntungkan si pelaku tetapi merugikan orang lain, termasuk perilaku agresif.

¹²Bandura, A. *Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory*. Englewood (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1986), 3.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan individu berperilaku agresif yaitu: *Pembenaran secara moral*.¹³ Melalui restrukturisasi kognisi, seseorang dapat saja mencari pembenaran sehingga perilaku agresif yang tadinya dianggap buruk menjadi terhormat. Misalnya, pelatihan dan pengkaderan dengan metode doktrinal yang dilakukan oleh ormas, atau sekelompok umat beragama, dapat mengubah kognisi individu sehingga merusak tempat ibadah umat yang berbeda agama dan membunuh penganut suatu agama yang berbeda dan menyesatkan yang dulunya dianggap salah dapat diubah menjadi sesuatu yang dianggap baik karena dilakukan demi kemurnian agama yang diyakini dan kemashalatan umat beragama atau membela kepentingan kelompok agama dan keyakinannya.

Pengaburan tanggungjawab. Orang cenderung bertindak lebih agresif bila dilakukan secara kolektif karena dapat mempersepsikan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap korban. Hal ini terjadi karena setiap anggota kelompok selalu dapat menunjuk anggota kelompok lain sebagai yang bertanggungjawab. Berbagai penyerangan antar kelompok umat beragama yang sering menimbulkan korban tanpa ada kejelasan tindak lanjut terhadap mereka yang bersalah, menunjukkan terjadinya pengaburan tanggungjawab pada kelompok yang bertindak secara massal, seperti kasus Sunni dan Syiah di Sampang, Madura, pembubaran aktivitas agama di Cirebon, Kasus Ahmadiyah di Jawa Barat, Pengrusakan tempat ibadah di Solo, Sumatera Utara, Jawa Barat, Aceh dan lain-lain. Penggunaan atribut; misalnya seragam, lambang, bendera, ikat kepala, slayer, yang sama oleh anggota kelompok penyerang, memperbesar kemungkinan terjadinya pengaburan tanggung jawab individu masing-masing anggota.

¹³Latipun dkk, 2001, *Psikologi Sosial*, (UMM Press, Malang, 2001), 44.

Distorsi terhadap konsekuensi. Setiap orang cenderung untuk mengingat efek positif dan melupakan efek negatif dari perbuatannya. Dalam pengertian ini orang lebih mudah melakukan tindak kekerasan bila tidak melihat langsung dampak/korban tindakan tersebut. Misalnya dalam organisasi yang memiliki garis komando panjang, semakin jauh jarak antara posisi seorang atasan dan korban yang akan dikenai suatu tindak kekerasan, semakin mudah bagi si atasan untuk memerintahkan bawahannya melakukan tindak kekerasan tersebut.

Dehumanisasi. Seseorang akan lebih mudah berperilaku agresif terhadap orang yang dianggap lebih rendah dari dirinya dibandingkan dengan orang yang sederajat dengan dirinya. Kelompok minoritas, kelompok miskin, masyarakat jelata, orang yang tidak dikenal atau yang dianggap sebagai anggota *out-group* sering termasuk dalam kelompok yang dianggap rendah. Situasi ini menjadi lebih buruk bila pihak yang melakukan tindak kekerasan merasa memiliki kekuasaan. Sedangkan pihak korban sedang berada dalam situasi yang lemah. Mudahnya kelompok yang merasa berkuasa menindas, berperilaku agresif, terhadap, kelompok lain. Misalnya apa yang terjadi pada beberapa tindak kekerasan atas nama agama di Sampang terhadap pengikut Syiah, kristendan muslim di Ambon dan Poso, kekerasan atas nama pemurnian agama terhadap Pengikut Tengku Aiyub di Aceh dan pengikut Ahmadiyah di Jawa Barat yang dituduh sesat.¹⁴

Dari beberapa cara terjadinya *deindividuasi*, yaitu saat dimana kesadaran diri, kemampuan menilai diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain menurun, sehingga meningkatkan tingkah laku impulsif, yang dalam hal ini dapat saja berbentuk perilaku agresif, melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain.

¹⁴ Ibid., 45.

Menurunkan Perilaku Agresif

Para ahli Psikologi sepakat bahwa salah satu cara yang efektif untuk menurunkan perilaku agresif adalah dengan memberikan hukuman (konsekuensi negatif) kepada para pelaku tindak kekerasan atas nama agama baik individual ataupun institusi agama dan organisasi massa. Namun menurut Deaux dkk. menyatakan bahwa pemberian hukuman hanya efektif bila persyaratan berikut terpenuhi, yaitu *adanya konsistensi hukum*. Hukuman itu dapat diramalkan pasti terjadi. Ini berarti harus ada konsistensi antar waktu dan antar individu bahwa perilaku agresif yang sama akan mendapat hukuman yang sama.

- a. Hukuman tersebut harus diberikan segera sesudah perilaku agresif terjadi.
- b. Penggunaan hukuman ini disahkan oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.
- c. Orang yang memberikan hukuman tidak boleh di lihat sebagai model/pelaku yang agresif.
- d. Memperkuat norma sosial melawan perilaku agresif dengan memuji perilaku non-agresif dan mengabaikan perilaku agresif.
- e. Mengurangi pemaparan (*eksposure*) dan informasi berlebihan terhadap model/pelaku yang berperilaku agresif.¹⁵

Dari persyaratan di atas, maka dapat memahami mengapa kekerasan antar umat bergama sangat mudah terjadi kapan saja dan terus berulang-ulang. Salah satu jawabanya karena teori pemberian hukuman yang efektif menurut teori yang diutarakan oleh Deaux dkk, tidak berlangsung efektif, karena sejumlah persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa *perlakuan terhadap para pelaku tindak kekerasan*

¹⁵ Deaux, K., Dane, F.C., Wrightsman, LS, In association with Sigelman, *Social Psychology in the '90s (&^h Ed.)*. (Pacific Groove, California Brooks/Cole Publishing Company, 1993).

sering tidak konsisten. Si A yang menyerang orang lain dapat dihukum sedangkan si B yang melakukan penyerangan yang sama dapat bebas dari hukuman karena ia dekat dengan kekuasaan dan penguasa.¹⁶

Proses penyidikan para pelaku tindak kekerasan atas nama agama dewasa ini masih banyak tidak jelas hasilnya. Dalam proses waktu yang panjang, maka tidak memungkinkan berbagai pelaku tindak kekerasan (intimidasi, pembunuhan dan pengrusakan) tersebut segera dihukum. Dalam konteks ini dapat dimengerti mengapa berbagai tindak kekerasan yang jelas melanggar hukum masih terus berlangsung.

Di lain sisi semakin banyaknya tindak kekerasan atas nama agama di antara pemeluk agama cenderung diangkat oleh media massa untuk memberitakan tindak kekerasan dari pada tindakan non-kekerasan, meningkatkan pemaparan terhadap model agresif yang tidak diimbangi dengan usaha meningkatkan pemaparan terhadap model non-agresif. Sebagai konsekuensinya akan sulit untuk mengharapkan terjadinya penurunan tindak kekerasan di masyarakat jika media masih saja menganggap "*bad news is good news*".

Salah satu upaya untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama di dimasyarkat adalah dengan dialog, musyawarah, diskusi, sarasehan, tatap muka, kunjungan silaturahmi, seminar para pemuka dan antar cendikiawan agama baik di daerah maupun di berbagai kecamatan. Ataupun melalui kajian baik di tingkat doktrin, konsep atau gagasan maupun pada tingkat historis-sosiologis, pengalaman masing-masing antar umat beragama dalam kehidupan nyata dalam masyarakat. Upaya dialog antar

¹⁶ Setiadi, B.N. & Graitto, B.K.I. (1998) *Peranan hukum dalam pembaharuan pola perilaku masyarakat*. Makalah dipresentasikan pada Simposium Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia di Depok, 30 Maret - 1 April., 2-3.

umat beragama diharapkan dapat menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang merupakan “pilar beton tengah” bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang plural ini.¹⁷

Perwujudan cita-cita masyarakat yang komunikatif dengan demikian dapat berjalan secara evolusi berdasarkan proses belajar serta peran sosial dari kesadaran pelaku tindakan komunikatif. Diantara alasan perlunya dialog antar agama adalah terwujudnya fakta pemahaman pluralitas agama, serta keinginan berkomunikasi dimasyarakat guna pencapaian saling pengertian dan pertumbuhan, serta terciptaan kerja sama yang hangat dalam masyarakat.¹⁸

Penutup

Sebagai penutup, dapat diutarakan beberapa alternatif sebagai jalan keluar guna penanggulaang tindak kekerasan atas nama agama yang sudah sering terjadi di masyarakat. Hal yang paling penting dalam situasi ini adalah mencegah terjadinya de-individuasi karena bila de-individuasi terjadi, pihak-pihak yang terlibat tidak akan mampu berpikir jernih dan mengendalikan perilaku mereka.

Melakukan dialog antar umat beragama dan intra umat beragama untuk menghasilkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Selanjutnya aparat hukum diharapkan dapat berperan aktif untuk segera menghukum siapapun yang memulai tindak kekerasan atas nama agama tanpa pengecualian. Dengan demikian setiap anggota masyarakat tahu bahwa siapapun yang memulai kekerasan akan mendapatkan konsekuensi

¹⁷Tarmizi Taher, “Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia” dalam Mustoha (peny.), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997),vii-xi.

¹⁸Mukti Ali, “Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan” dalam Weinata Sairin (ed.), *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 14-16.

negatif (*punishment*). Hal tersebut sesuai dengan teori belajar instrumental dan observasional, perilaku yang selalu mendapat konsekuensi negatif tidak akan diulangi atau ditiru. Selanjutnya aparat keamanan melaksanakan penerapan hukum dan peraturan secara konsisten di semua tingkat. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan ketenangan kepada semua warga negara sehingga menurunkan tingkat stres di antara umat beragama dalam masyarakat.

Selanjutnya menghimbau media massa agar dalam memberikan pemberitaan tentang tindak kekerasan lebih memfokuskan pada dampak negatif tindak kekerasan dan bukan pada peristiwa kekerasan itu saja. Media massa hendaknya memberitakan pemberitaan yang seimbang, faktual dan tidak emosional sehingga *arousal* yang dialami warga masyarakat dapat diatribusikan pada penyebab yang sebenarnya dan bukan pada rumor yang beredar.

Akhirnya solusi alternatif yang mungkin dilakukan adalah dengan menciptakan tujuan yang utama untuk dicapai bersama. Menurut para ahli psikologi sosial salah satu cara untuk menghilangkan pertentangan antar kelompok adalah dengan memunculkan tujuan lebih tinggi (*superordinate goal*) yang bila tercapai akan menguntungkan bagi semua kelompok yang bertentangan dan berbeda pendapat. Untuk saat ini masyarakat membutuhkan keamanan dan saling cinta, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada diantara pemeluk agama-agama yang ada di Indonesia. Keamanan dan keharmonisan antar umat beragama akan melahirkan keamanan dan kenyamanan di masyarakat sehingga perbaikan ekonomi, dan kesejahteraan yang adil dan beradab dapat diwujudkan

Daftar Pustaka

A, Bandura. *Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory*. Englewood, New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 1986.

- B.N, Setiadi, & Graitto, B.K.I. *Peranan Hukum dalam Pembaharuan Pola Perilaku Masyarakat*. Makalah dipresentasikan pada Simposium Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia di Depok, 30 Maret - 1 April, 1998.
- Baron, Robert. *Psikologi Sosial*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Deaux, K., Dane, F.C., Wrightsman, L.S., In association with Sigelman, *Social Psychology in the '90s (&h Ed.)*. Pacific Groove. California Brooks/Cole Publishing Company, 1993.
- H, Suryosumarto Budisantoso." *Ketahanan Nasional Indonesia, Penangkal Disintegrasi bangsa dan Negara*". Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2001.
- Laporan SETARA INSTITUTE tentang Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, 2012.dalam, <http://www.setara-institute.org/en/content/report-freedom-religion-and-belief-mid-2013>
- Laporan The Wahid Institute tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia, 2012.dalam. http://wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=213/hl=id/Laporan_KBB_Dan_Intoleransi_2012.
- Latipun dkk. *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press, 2001.
- Moerdiono. *Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran*. Jakarta, Sarasehan Sehari Majelis Ulama Indonesia, 5 Nopember 1966.
- Mukti, Ali. "Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan" dalam Weinata Sairin (ed.). *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun*

Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

Ridho, dalam, <http://ridhofkip.blogspot.com/2013/03/kerukunan-umat-beragama-menuju.html>,

Sarwono, Sarlito Wiraman. "*Psikologi Sosial*". Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Serambi Indonesia, 26 Mei 2013.

Taher, Tarmizi. "Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia," dalam, Mustoha (peny.), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.